

Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kantor Pertanahan Nasional Boyolali

Eko Dini Ratmawati¹, M. Hasan Ma'ruf², Wikan Budi Utami³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia.

Alamat Email:

ekodiniratmawati@gmail.com¹, muhammadhasan37@yahoo.co.id², budiutamiwikan@gmail.com³

Sitasi Artikel:

Ratmawati, E. D., Ma'ruf, M. H., & Utami, W. B. (2026). Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kantor Pertanahan Nasional Boyolali. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 5(1), 73–81. <https://doi.org/10.53088/jikab.v5i1.177>

Abstract: *This study aims to examine the effects of budget target clarity, accounting control, and reporting systems on the performance accountability of government agencies at the National Land Agency Office of Boyolali Regency. This study employed a quantitative approach with an explanatory research design. Primary data were collected through questionnaires distributed to 55 respondents selected using purposive sampling and analyzed using multiple linear regression with IBM SPSS. The results indicate that accounting control and reporting systems have a positive and significant effect on the performance accountability of government agencies, whereas budget target clarity has no significant effect. These findings suggest that effective accounting control and high-quality reporting systems are more closely associated with improving performance accountability in the research setting. This study contributes empirical evidence to the public sector accounting literature and provides practical insights for strengthening government performance accountability.*

Keywords: *accounting control; budget target clarity; government performance accountability; reporting system.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory research. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada 55 responden menggunakan teknik purposive sampling, kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan IBM SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian akuntansi dan kualitas sistem pelaporan berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas kinerja pada objek penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kajian akuntansi sektor publik serta menjadi masukan bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Kata Kunci: akuntabilitas kinerja; kejelasan sasaran anggaran; pengendalian akuntansi; sistem pelaporan.

1. Pendahuluan

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Akuntabilitas tidak hanya

dimaknai sebagai kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik, tetapi juga sebagai bentuk transparansi atas pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Implementasi akuntabilitas kinerja di Indonesia semakin diperkuat melalui

penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan kualitas kinerja organisasi di sektor publik. Penerapan SAKIP diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun demikian, berbagai hasil evaluasi pemerintah masih menunjukkan bahwa kualitas akuntabilitas kinerja antarinstitusi pemerintah belum sepenuhnya optimal sehingga memerlukan penguatan sistem pengelolaan keuangan dan pengendalian internal.

Dalam konteks organisasi sektor publik, pencapaian akuntabilitas kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor organisasi, di antaranya kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Kejelasan sasaran anggaran memberikan arah yang jelas mengenai target organisasi sehingga memudahkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Di sisi lain, pengendalian akuntansi berfungsi untuk memastikan seluruh aktivitas keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mampu meminimalkan penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Selain itu, sistem pelaporan yang berkualitas menghasilkan informasi yang relevan, andal, tepat waktu, dan transparan sebagai dasar pengambilan keputusan serta evaluasi kinerja organisasi. Oleh karena itu, ketiga faktor tersebut dipandang sebagai komponen penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Anjarwati, 2012; Makruf, 2024).

Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu mengenai determinan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih menunjukkan adanya inkonsistensi. Penelitian Anjarwati (2012) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sebaliknya, beberapa

penelitian terbaru menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak selalu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, sedangkan pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan cenderung memberikan pengaruh yang lebih konsisten (Makruf, 2024; Maulidya, 2024). Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel masih memerlukan pengujian lebih lanjut pada berbagai karakteristik organisasi sektor publik sehingga diperoleh bukti empiris yang lebih komprehensif.

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pelayanan publik. Pelaksanaan tugas tersebut didukung oleh pengelolaan anggaran negara yang harus memenuhi prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Sebagai instansi yang mengelola pelayanan publik secara langsung, kualitas pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa setiap program dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun kepada masyarakat. Oleh karena itu, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali menjadi lokasi yang relevan untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam pengujian simultan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pada instansi vertikal pemerintah di bidang pertanahan. Berbeda dengan sebagian penelitian sebelumnya yang dilakukan pada pemerintah daerah atau satuan kerja perangkat daerah, penelitian ini menggunakan objek organisasi dengan karakteristik pelayanan publik yang berbeda, sehingga diharapkan mampu memberikan bukti



empiris tambahan mengenai faktor-faktor yang paling dominan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur akuntansi sektor publik sekaligus menjadi masukan praktis bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja.

2. Tinjauan Teoritis

2.1 *Agency Theory*

Agency Theory yang dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling (1976) menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara principal dan agent, di mana principal memberikan mandat kepada agent untuk mengelola sumber daya organisasi demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam sektor publik, masyarakat dan pemerintah pusat bertindak sebagai principal, sedangkan instansi pemerintah berperan sebagai agent yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Permasalahan utama dalam hubungan keagenan adalah munculnya *information asymmetry*, yaitu kondisi ketika agent memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan principal sehingga berpotensi menimbulkan moral hazard maupun penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengendalian melalui sistem penganggaran yang jelas, pengendalian akuntansi yang memadai, serta sistem pelaporan yang transparan agar seluruh aktivitas organisasi dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan demikian, *Agency Theory* menjadi landasan teoritis yang menjelaskan pentingnya kejelasan sasaran anggaran,

pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.2 Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kejelasan sasaran anggaran merupakan tingkat kejelasan tujuan anggaran yang dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan mudah dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan organisasi dalam menyusun program kerja, mengalokasikan sumber daya, memantau, serta mengevaluasi pencapaian kinerja. Menurut Kenis (1979), kejelasan sasaran anggaran memungkinkan pegawai memahami target organisasi sehingga dapat meningkatkan motivasi kerja dan efektivitas pelaksanaan program. Dalam perspektif *Agency Theory*, sasaran anggaran yang jelas dapat mengurangi konflik kepentingan antara principal dan agent karena indikator keberhasilan telah ditetapkan secara terukur.

Meskipun secara teoritis kejelasan sasaran anggaran diperkirakan mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan adanya inkonsistensi. Penelitian Anjarwati (2012) menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Agustin (2018) yang menunjukkan bahwa semakin jelas sasaran anggaran, semakin baik akuntabilitas kinerja organisasi sektor publik. Sebaliknya, Makruf (2024) menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran belum mampu meningkatkan kinerja organisasi secara signifikan dalam konteks tertentu, sedangkan Maulidya (2024) menunjukkan bahwa pengaruh variabel tersebut sangat dipengaruhi oleh karakteristik organisasi dan sistem pengelolaan yang diterapkan. Inkonsistensi hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja masih memerlukan pembuktian empiris pada instansi pemerintah



dengan karakteristik yang berbeda, termasuk di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H1: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.3 Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengendalian akuntansi merupakan serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan dicatat dengan benar, aset organisasi terlindungi, serta seluruh aktivitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Hansen dan Mowen (2007), pengendalian merupakan proses untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam organisasi sektor publik, pengendalian akuntansi menjadi instrumen penting untuk mewujudkan transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam perspektif *Agency Theory*, pengendalian akuntansi merupakan mekanisme pengawasan (*monitoring mechanism*) yang digunakan untuk mengurangi perilaku oportunistik agent sekaligus meningkatkan kepercayaan *principal* terhadap informasi yang dihasilkan organisasi.

Secara empiris, sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Anjarwati (2012) dan Widaryanti dan Pancawardani (2020) menemukan bahwa pengendalian akuntansi mampu meningkatkan akuntabilitas melalui penguatan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan keuangan. Namun demikian, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa besarnya pengaruh pengendalian akuntansi berbeda-beda bergantung pada kapasitas sumber

daya manusia, budaya organisasi, dan efektivitas implementasi sistem pengendalian pada masing-masing instansi pemerintah. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pengendalian akuntansi dan akuntabilitas kinerja masih memerlukan pengujian lebih lanjut pada berbagai organisasi sektor publik.

H2: Pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.4 Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem pelaporan merupakan mekanisme penyampaian informasi mengenai penggunaan anggaran, pencapaian program, dan kondisi keuangan organisasi kepada para pemangku kepentingan. Sistem pelaporan yang berkualitas harus menghasilkan informasi yang relevan, andal, lengkap, tepat waktu, dan mudah dipahami sehingga mampu mendukung proses evaluasi kinerja organisasi. Dalam perspektif *Agency Theory*, sistem pelaporan menjadi media komunikasi yang mengurangi asimetri informasi antara principal dan agent. Semakin baik kualitas informasi yang disampaikan melalui sistem pelaporan, semakin tinggi tingkat transparansi dan akuntabilitas organisasi sektor publik.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sistem pelaporan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja. Anjarwati (2012), Lirda (2023), dan Maulidya (2024) membuktikan bahwa sistem pelaporan yang efektif berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena mampu menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sistem pelaporan sangat dipengaruhi oleh kualitas teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, serta komitmen organisasi dalam menerapkan prinsip transparansi. Dengan demikian, masih terdapat ruang untuk menguji

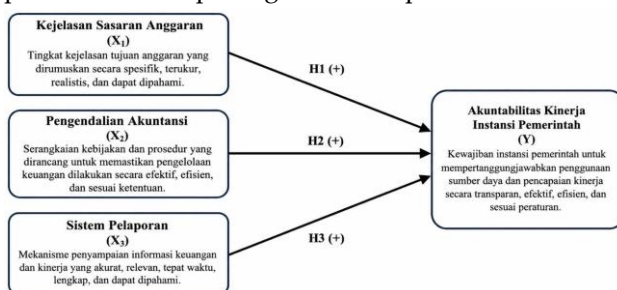


kembali konsistensi hubungan antara sistem pelaporan dan akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah dengan karakteristik organisasi yang berbeda.

H3: Sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.5 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian teori, *Agency Theory*, dan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual yang menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan merupakan faktor-faktor yang diduga memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran memberikan arah dan target yang terukur dalam pelaksanaan program, sehingga memudahkan evaluasi pencapaian kinerja. Pengendalian akuntansi berperan sebagai mekanisme pengawasan yang memastikan pengelolaan sumber daya dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, sistem pelaporan menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu sebagai dasar pertanggungjawaban serta evaluasi kinerja organisasi. Dengan demikian, semakin baik penerapan ketiga aspek tersebut, semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hubungan antarvariabel dalam penelitian ini dapat digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber: Diadaptasi berdasarkan *Agency Theory* (Jensen & Meckling, 1976) dan penelitian terdahulu (Anjarwati, 2012; Widaryanti & Pancawardani, 2020; Makruf, 2024; Maulidya, 2024).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian explanatory research, yaitu penelitian yang bertujuan menguji hubungan kausal antara kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu mengukur hubungan antarvariabel secara objektif melalui analisis statistik berdasarkan data numerik yang diperoleh dari responden. Objek penelitian adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali yang berjumlah 124 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Kriteria responden meliputi pegawai yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, sistem pelaporan, maupun pengendalian internal serta memiliki masa kerja minimal satu tahun sehingga dianggap memahami mekanisme pengelolaan keuangan instansi. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 55 responden yang memenuhi persyaratan sebagai sampel penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh responden. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian dan diukur menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari skor 1 (sangat tidak setuju) hingga skor 5 (sangat setuju). Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas kejelasan sasaran anggaran (X_1), pengendalian akuntansi (X_2), dan sistem pelaporan (X_3), sedangkan variabel dependen adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).

Data yang telah terkumpul dianalisis

menggunakan IBM SPSS Statistics melalui beberapa tahapan analisis, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, serta uji heteroskedastisitas. Selanjutnya, dilakukan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya dilakukan uji simultan (uji F) untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama, uji parsial (uji t) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen, serta uji koefisien determinasi (Adjusted R²) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

Seluruh item pernyataan memiliki nilai r hitung lebih besar daripada r tabel (0,2241) serta nilai Cronbach's Alpha melebihi 0,70. Dengan demikian seluruh instrumen dinyatakan valid dan reliabel sehingga layak digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Tabel 4.1 Hasil Uji Kualitas Instrumen

Variabel	Jumlah Item	r hitung	Cronbach Alpha	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran	5	>0,224	0,790	Valid & Reliabel
Pengendalian Akuntansi	9	>0,224	0,835	Valid & Reliabel
Sistem Pelaporan	5	>0,224	0,787	Valid & Reliabel
Akuntabilitas Kinerja	10	>0,224	0,890	Valid & Reliabel

Sumber: Data primer diolah (2025).

Hasil uji asumsi klasik (Tabel 4.2) menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas, tidak mengalami multikolinearitas maupun heteroskedastisitas, sehingga analisis regresi linier berganda dapat dilakukan.

Tabel 4. 2. Hasil Uji Asumsi Klasik.

Jenis Uji	Hasil	Keterangan
Normalitas	Sig. Monte Carlo = 0,120	Normal
Multikolinearitas	Tolerance >0,10; VIF <10	Tidak terjadi multikolinearitas
Heteroskedastisitas	Sig. seluruh variabel >0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Hasil regresi (Tabel 4.3) menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sebaliknya, kejelasan sasaran anggaran tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan karena memiliki nilai signifikansi sebesar 0,757 (>0,05).

$$Y = 3,562 - 0,004X_1 + 0,915X_2 + 0,159X_3 + e$$

Tabel 4.3 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	B	t hitung	Sig.	Keputusan
Konstanta	3,562	-	-	-
Kejelasan Sasaran Anggaran	- 0,004	-0,311	0,757	Tidak Signifikan
Pengendalian Akuntansi	0,915	33,101	0,000	Signifikan
Sistem Pelaporan	0,159	3,215	0,002	Signifikan

Sumber: Data primer diolah (2025).

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hanya variabel pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan yang berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh signifikan

Tabel 4.4 Hasil Uji Kelayakan Model.

Pengujian	Nilai
F hitung	1929,541
Sig. F	0,000
Adjusted R ²	0,990

Sumber: Data primer diolah (2025).

Hasil uji F menunjukkan bahwa model regresi secara simultan layak digunakan karena memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 (<0,05). Selain itu, nilai Adjusted R² sebesar 0,990 menunjukkan bahwa variasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dijelaskan oleh variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan

sistem pelaporan sebesar 99,0%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Namun demikian, nilai Adjusted R² yang sangat tinggi perlu diverifikasi kembali melalui pemeriksaan output SPSS untuk memastikan tidak terjadi kesalahan input data, spesifikasi model, maupun pelaporan hasil analisis.

Berdasarkan hasil analisis data, seluruh instrumen penelitian telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, serta model regresi telah memenuhi asumsi klasik sehingga layak digunakan untuk pengujian hipotesis. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variabel independen membentuk model penelitian yang signifikan dalam menjelaskan variasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan akuntabilitas kinerja pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali lebih ditentukan oleh efektivitas pengendalian akuntansi dan kualitas sistem pelaporan dibandingkan dengan kejelasan sasaran anggaran.

4.2. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memberikan temuan yang berbeda pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan akuntabilitas kinerja tidak hanya ditentukan oleh kejelasan perencanaan anggaran, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas mekanisme pengendalian serta kualitas sistem

pelaporan yang diterapkan di dalam organisasi.

Dalam perspektif *Agency Theory* yang dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling (1976), hubungan antara masyarakat sebagai principal dan instansi pemerintah sebagai agent menimbulkan potensi asimetri informasi yang dapat mengurangi akuntabilitas apabila tidak didukung oleh mekanisme pengendalian dan pelaporan yang memadai. Oleh karena itu, kejelasan sasaran anggaran memang diperlukan sebagai pedoman dalam penyusunan program dan pengalokasian sumber daya, namun keberadaannya belum tentu mampu meningkatkan akuntabilitas apabila implementasinya tidak diikuti oleh sistem pengendalian yang efektif serta pelaporan yang transparan. Kondisi ini menjelaskan mengapa, dalam penelitian ini, kejelasan sasaran anggaran belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Makruf (2024) dan Maulidya (2024) yang menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak selalu menjadi faktor dominan dalam meningkatkan akuntabilitas maupun kinerja organisasi sektor publik. Sebaliknya, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Anjarwati (2012) yang menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perbedaan hasil tersebut diduga dipengaruhi oleh karakteristik organisasi, budaya kerja, kualitas sumber daya manusia, serta efektivitas implementasi sistem penganggaran pada masing-masing instansi pemerintah. Dengan demikian, kejelasan sasaran anggaran tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja, melainkan harus didukung oleh sistem pengendalian dan mekanisme pelaporan yang berjalan secara efektif.

Berbeda dengan kejelasan sasaran anggaran, penelitian ini membuktikan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan



terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian akuntansi yang diterapkan, semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas kinerja organisasi. Pengendalian akuntansi berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang memastikan setiap aktivitas keuangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan, prosedur, dan tujuan organisasi sehingga mampu meminimalkan risiko penyimpangan, meningkatkan kepatuhan, serta memperkuat transparansi dalam pengelolaan keuangan. Temuan ini mendukung *Agency Theory* yang menegaskan bahwa mekanisme pengendalian merupakan instrumen penting untuk mengurangi konflik kepentingan antara principal dan agent melalui peningkatan fungsi monitoring dan pengawasan. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Anjarwati (2012), Widaryanti dan Pancawardani (2020), serta Maulidya (2024) yang menyimpulkan bahwa pengendalian akuntansi merupakan salah satu determinan utama dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa kualitas sistem pelaporan yang baik akan menghasilkan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mendukung proses evaluasi kinerja serta pengambilan keputusan. Dalam kerangka *Agency Theory*, sistem pelaporan berfungsi sebagai media komunikasi yang mengurangi asimetri informasi antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Semakin baik kualitas informasi yang disampaikan melalui sistem pelaporan, semakin tinggi tingkat transparansi dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Anjarwati (2012), Lirda (2023), dan Maulidya (2024) yang menyatakan bahwa sistem

pelaporan merupakan faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena mampu menyediakan informasi yang andal sebagai dasar pengawasan dan pertanggungjawaban publik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih ditentukan oleh efektivitas pengendalian akuntansi dan kualitas sistem pelaporan dibandingkan dengan kejelasan sasaran anggaran. Temuan tersebut memperkuat *Agency Theory* yang menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dan penyediaan informasi dalam membangun hubungan yang akuntabel antara pemerintah dan masyarakat. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali perlu memprioritaskan penguatan sistem pengendalian akuntansi melalui peningkatan kepatuhan terhadap prosedur operasional, pengawasan internal yang berkelanjutan, serta optimalisasi sistem pelaporan yang akurat, transparan, dan tepat waktu. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola organisasi sekaligus memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap 55 responden di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali, penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan kejelasan sasaran anggaran tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan akuntabilitas kinerja pada objek penelitian lebih berkaitan dengan efektivitas mekanisme pengendalian akuntansi dan kualitas sistem pelaporan dibandingkan dengan kejelasan sasaran



anggaran. Hasil penelitian ini juga memberikan bukti empiris bahwa implementasi sistem pengendalian dan pelaporan yang baik berperan dalam mendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam konteks penelitian ini.

6. Keterbatasan Dan Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup penelitian yang hanya dilakukan pada satu instansi pemerintah dengan jumlah responden yang relatif terbatas, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi ke seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan objek penelitian yang lebih beragam, menggunakan jumlah sampel yang lebih besar, serta mempertimbangkan variabel lain yang secara teoritis berpotensi memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, seperti kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, sistem pengendalian internal, atau pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dikembangkan secara lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Agustin, K. (2018). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta). *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Anjarwati, M. (2012). Pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 13(1), 15–27.
- Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2007). *Managerial Accounting* (8th ed.). Thomson South-Western.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kenis, I. (1979). Effects of budgetary goal characteristics on managerial attitudes and performance. *The Accounting Review*, 54(4), 707–721.
- Lirda, M. (2023). Pengaruh implementasi anggaran, sistem pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Studi empiris pada Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal EPJA*, 297–306.
- Makruf, M. R. (2024). Pengaruh akuntabilitas, kejelasan sasaran, dan desentralisasi terhadap kinerja manajerial di Kota Mojokerto. *Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 2(2), 79–88. <https://doi.org/10.35912/sekp.v2i2.2775>
- Maulidya, P. D. (2024). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Studi kasus pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1–15.
- Widaryanti, & Pancawardani, N. L. (2020). Pengaruh pengendalian akuntansi dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 15(2), 376–390.

